

**PENGARUH *COLLECTIVISM*,
HERDING BEHAVIOR DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI
TERHADAP INTENSI PENGIMPLEMENTASIAN
SAK EMKM**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

PUSPA RINI

2019/19043181

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

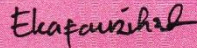
**PENGARUH *COLLECTIVISM*,
HERDING BEHAVIOR DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI
TERHADAP INTENSI PENGIMPLEMENTASIAN
SAK EMKM**

Nama : Puspa Rini
NIM/TM : 19043181/2019
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2021

Disetujui Oleh:

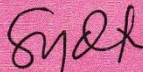
Pembimbing



Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP.19710522 200003 2 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA
NIP.19800103 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh *Collectivism*, *Herding Behavior* dan
Pemahaman Akuntansi terhadap Intensi
Pengimplementasian SAK EMKM

Nama : Puspa Rini

NIM/TM : 19043181/2019

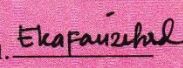
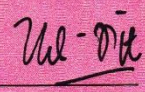
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2021

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Anggota	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	Nelvrita, SE, M.Si, Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspa Rini
NIM/TM : 19043181/2019
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai/29 September 1997
Program Studi : SI Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Siak Gg. Aru No. 03, Kel. STDI, Kec. Dumai
Barat, Kota Dumai.
No. HP/Telp. : 085213788025
Judul : Pengaruh *Collectivism*, *Herding Behavior* dan
Pemahaman Akuntansi terhadap Intensi
Pengimplementasian SAK EMKM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil saya dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani Asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, November 2021

Penulis,



Puspa Rini
NIM. 19043181

ABSTRAK

Puspa Rini, 19043181/2019, Pengaruh *Collectivism*, *Herding Behavior* dan Pemahaman Akuntansi terhadap Intensi Pengimplementasian SAK EMKM Pembimbing : Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *collectivism*, *herding behavior* dan pemahaman akuntansi terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM pada manajer atau pengelola UMKM di Kota Dumai. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian *survey* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer atau pengelola UMKM di Kota Dumai, Indonesia. Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 80 orang sampel. Jenis data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Analisis data menggunakan regresi berganda, intensi pengimplementasian SAK EMKM sebagai variabel terikat dan *collectivism*, *herding behavior* dan pemahaman akuntansi sebagai variabel bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *collectivism* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM, sehingga hipotesis 1 ditolak; (2) *herding behavior* berpengaruh signifikan positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM, sehingga hipotesis 2 diterima; (3) pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM, sehingga hipotesis 3 diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa *herding behavior* dan pemahaman akuntansi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM, sedangkan *collectivism* tidak.

Kata Kunci : *Collectivism*, *Herding Behavior*, Pemahaman Akuntansi, SAK EMKM, UMKM

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	13
A. Kajian Teori	13
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Pengembangan Hipotesis	40
D. Kerangka Konseptual	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Populasi dan Sampel	47
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	49
F. Instrumen Penelitian	54
G. Teknik Analisis Data.....	55
H. Alat Uji Statistik	56
I. Operasional Variabel	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Data Penelitian	64
B. Demografi Responden	64
C. Analisis Deskriptif.....	66
D. Analisis Data	75
E. Pembahasan	92
BAB V PENUTUP.....	975
A. Kesimpulan.....	975
B. Keterbatasan	98
B. Implikasi Penelitian	98
C. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	98
LAPIRAN 1. Kuesioner Penelitian	104

BAB I

PENDAHULUAN

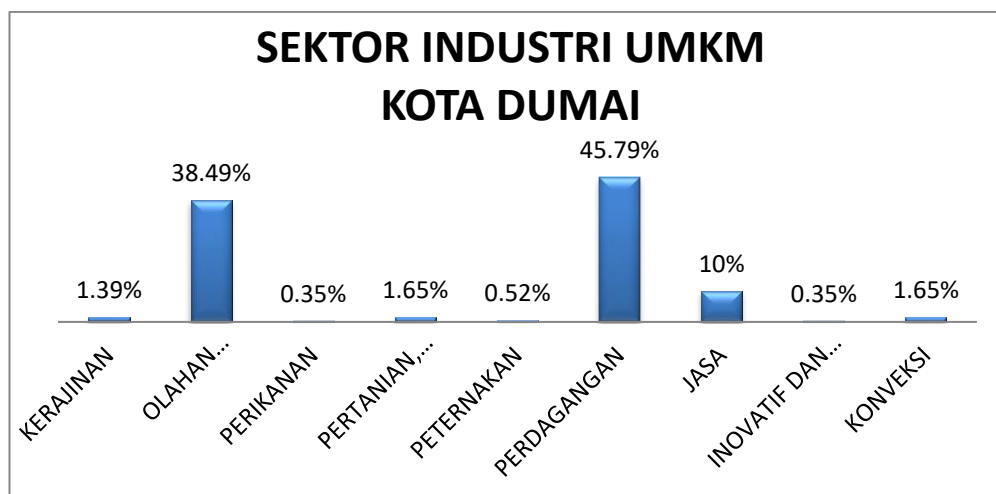
A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian ekonomi masyarakat yang berkontribusi besar dalam meningkatkan taraf perekonomian suatu bangsa. Kontribusi UMKM bagi perekonomian antara lain mampu menyerap tenaga kerja. Bappenas (2019) menyatakan bahwa UMKM menyerap tenaga kerja Indonesia sebesar 97 %, sehingga dalam hal ini menjadi pengurang tingkat pengangguran.

Selain menyerap tenaga kerja UMKM juga berperan sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia. PDB merupakan suatu nilai atas jasa dan barang yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2013:34). Kontribusi UMKM terhadap PDB dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2.5 % (kemenkopukm.go.id).

Pemerintah memasukan UMKM ke salah satu bagian penting dari narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 (Bappenas, 2019). Berdasarkan RPJMN IV 2020-2024 tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan membantu mengembangkan UMKM di Indonesia melalui bantuan pendanaan, pelatihan, kemitraan dan sebagainya. Hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang berisi tentang adanya penjaminan, pembiayaan, kemitraan dan pengembangan melalui pemberian bantuan, pendampingan, bimbingan dan fasilitas oleh pemerintah.

Dalam lingkup yang lebih kecil, eksistensi peran UMKM dalam perkembangan usaha juga terjadi di Kota Dumai. Kota Dumai merupakan sebuah kota yang strategis dengan jalur laut langsung terhubung dengan Selat Melaka yang merupakan jalur internasional, sehingga Kota Dumai memiliki prospek wirausaha yang besar. Saat ini terdapat sebanyak 1.151 jumlah UMKM tercatat di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Dumai dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: Data diolah oleh Penulis 2021

Gambar 1.1
Sektor UMKM Kota Dumai 2020 yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan Perindustrian UMKM Kota Dumai 2020

Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa terdapat sembilan sektor industri UMKM yaitu sektor industri kerajinan, sektor industri olahan makanan atau minuman, sektor industri perikanan, sektor industri pertanian, perkebunan dan kehutanan, sektor industri peternakan, sektor industri perdagangan, sektor industri jasa, sektor industri inovatif dan kreatif dan sektor industri konveksi.

Adapun sektor industri UMKM terbesar adalah industri perdagangan sebesar 45.79 %, lalu disusul oleh sektor industri olahan makanan dan minuman sebesar 38.49 %. Industri terendah adalah industri perikanan dan industri inovatif dan kreatif masing-masing sebesar 0.35 %.

Data tersebut mengindikasikan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar jika dikelola dan dikembangkan dengan baik. Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa masalah. Masalah yang paling umum bagi UMKM adalah lemahnya pembuatan laporan keuangan.

Fakta empiris yang berhasil penulis kumpulkan dalam berbagai forum diskusi, menunjukkan bahwa mayoritas manajer atau pengelola UMKM di Kota Dumai kurang paham terhadap laporan keuangan, Jumat (18/6) (Puspa, 2021). Mereka berasumsi pekerjaan akuntansi menambah beban mereka dan lebih condong pada pencatatan laba terkait pengeluaran dan pemasukan. Maka, permasalahan-permasalahan terkait disiplin pembuatan laporan keuangan bagi UMKM masih dinilai krusial seperti tak berujung.

Isu ini telah menarik perhatian sejumlah peneliti diantaranya, Yanto et al. (2017); Pradita et al. (2018); Salmiah et al. (2018); & Pardita et al. (2019). Mereka menyatakan bahwa pembuatan laporan keuangan memiliki peran krusial bagi keberlangsungan suatu usaha termasuk UMKM. Adapun peran krusial dari pembuatan laporan keuangan bagi UMKM adalah mempermudah UMKM untuk melakukan pendanaan permodalan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi tentang keuangan entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi (Warsadi et al., 2017). Akan tetapi, sebagian

besar pengelola UMKM belum melakukan pencatatan akuntansi apalagi sampai membuat laporan keuangan sesuai standar berlaku umum (Febriyanti & Wardhani, 2018).

Pada penelitian terdahulu Saragih & Surikayanti (2015); Widyastuti (2017); Warsadi et al. (2017); Hasan et al. (2019) menyatakan bahwa implementasi akuntansi sesuai standar bagi UMKM masih belum terlaksana dengan baik dan masih sangat sederhana serta manual. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemahaman pengusaha terhadap tujuan, manfaat dan tahapan penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi ETAP (Widyastuti, 2017).

Pardita et al. (2019) menyatakan bahwa pengusaha lebih mudah memahami SAK EMKM karena standar ini disesuaikan oleh kebutuhan UMKM, sehingga dapat mengetahui kondisi perusahaan dan kinerja usaha mereka. Menurut Yanto et al. (2020) kinerja UMKM secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan informasi akuntansi oleh manajer atau pemilik usaha. Namun, pelaksanaan standar akuntansi bagi UMKM masih bernilai cukup (Salmiah et al., 2018).

Berdasarkan fakta dan bukti empiris tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya peran UMKM tidak berbanding lurus dengan intensi pengelola atau manajer UMKM untuk mengimplementasikan standar akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan. Menurut Ajzen (1991) intensi merupakan suatu indikasi seberapa keras orang mau mencoba dan seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan perilaku.

Pada *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menyatakan intensi merupakan faktor utama untuk memprediksi perilaku. Secara konseptualnya, terdapat tiga landasan prediktor keyakinan independen yaitu: (1) sikap terhadap perilaku, (2) norma subyektif, (3) kontrol perilaku yang dirasakan. Adapun sikap merupakan persepsi individu tentang konsekuensi menguntungkan atau tidak dari suatu perilaku. Adapun norma subyektif yaitu keyakinan individu tentang tekanan sosial yang dirasakan, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Adapun kontrol perilaku yang dirasakan merupakan keyakinan atau persepsi orang tentang kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan suatu perilaku. Kemudahan atau kesulitan kontrol perilaku yang dirasakan tersebut berkaitan tentang sumber daya dan peluang yang tersedia.

Wishnuwardhani & Mangundjaya (2008) dalam Andhika & Damayanti (2017) menyatakan bahwa terkait norma subyektif tersebut akan menyeret individu untuk berperilaku yang ditentukan oleh budaya nasional dalam kelompok. Berdasarkan model (Hofstede Insight, 2021) budaya nasional dibagi menjadi enam dimensi yaitu: *power distance*, *collectivism-individualism*, *masculinity*, *uncertainty avoidance*, *long term orientation*, dan *indulgence*.

Collectivism diduga menjadi faktor penting yang mempengaruhi intensi dalam penelitian ini, karena tingkat *individualism* di Indonesia dikatakan rendah dengan skor 14 (Hofstede Insight, 2021). *Collectivism* atau kolektivisme merupakan kebalikan dari *individualism*. *Collectivism*

didefinisikan sebagai sejauh mana orang-orang dalam masyarakat diintegrasikan ke dalam kelompok yang kuat dan kohesif. Seringkali keluarga besar yang terus melindungi mereka dengan imbalan kesetiaan yang tidak perlu dipertanyakan dan menentang yang lain dalam kelompok (Hofstede, 2005).

Nurtjahjani et al. (2018) menyatakan bahwa budaya nasional dalam praktik manajemen mempengaruhi budaya organisasi di suatu perusahaan. Baldarelli et al. (2007; 2012) menyatakan pentingnya faktor budaya demi harmonisasi penerapan standar akuntansi untuk UMKM. Yanto et al. (2017) menyatakan bahwa terdapat upaya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pengimplementasian standar akuntansi bagi UMKM yaitu dengan mengembangkan budaya organisasi didalamnya.

Selama ini pada penelitian terdahulu membahas *collectivism* pada lintas budaya. Pada penelitian (Prince & Kabst, 2019) membahas *collectivism* dengan kaitan praktik seleksi pegawai pada 18 perusahaan di negara berbeda. Kemudian penelitian selanjutnya budaya hofstede pada organisasi atau perusahaan. Pada penelitian (Pratiwi & Dwita, 2020) mengungkapkan adanya pengaruh positif budaya *power distance* terhadap keputusan *whistleblowing* pada auditor. Kemudian pada penelitian (Septarini & Yuwono, 2015) melihat pengaruh *collectivism* terhadap kompetensi inti pada kelompok lini manajerial PT. Semen Gresik.

Pada tahun 2015 (Widodo & Qurniawati, 2015) melihat *collectivism* pada keputusan perilaku pembelian ramah lingkungan di Salatiga. Pada 2017 (Nurlaeli, 2017) menguji pengaruh *collectivism* terhadap keputusan nasabah memilih Bank di Banyumas. Pada penelitian selanjutnya (Puspitasari & Mas'ud, 2018) menunjukkan adanya pengaruh *collectivism* pada gaya manajemen konflik. Pengujian penelitian *collectivism* pada etnis Jawa dilakukan oleh (Wishnuwardhani & Mangundjaya, 2008). Kemudian pada etnis Minangkabau (Yulanda, 2015). Namun, kurang membahas tentang tingkat *collectivism* pada masyarakat etnis Melayu dalam pengambilan keputusan.

Terkhusus masyarakat Kota Dumai merupakan masyarakat kolektif yang didominasi oleh suku melayu (sddkd.riau.go.id). Dalam literatur belum ditemukan penelitian terkait *collectivism* pada budaya melayu. Oleh karena itu, penelitian terkait *collectivism* masyarakat melayu dalam pengambilan keputusan dapat menjadi hal kebaruan. Adapun sampel manajer atau pengelola UMKM di Kota Dumai diharapkan dapat mencerminkan budaya melayu yang *collectivism*. Berdasarkan teori Hofstede tersebut, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat *collectivism* pada manajer atau pengelola UMKM, maka semakin tinggi tingkat keputusan mereka untuk mengikuti kelompok dalam mengimplementasikan SAK EMKM.

Faktor lain yang diduga kuat mempengaruhi keputusan implementasi standar akuntansi bagi manajer atau pengelola UMKM adalah *herding behavior*. *Herding behavior* dapat dijelaskan sebagai naluri yang berasal dari

ketergantungan psikologis bawaan manusia untuk mengikuti kelompok sosial mereka (Trotter, 1908).

Prevalensi *herding* pada disiplin ilmu ekonomi di Indonesia telah menarik perhatian. Sejauh ini, penelitian *herding behavior* pada disiplin Ilmu Ekonomi di Indonesia didominasi oleh keputusan investor dalam berinvestasi, (Setiyono et al., 2013; Fransiska et al., 2018). Fenomena *herding* di Indonesia baru-baru ini terkait intensi Direktur BEI Laksono Widodo. Laksono Widodo membuat perencanaan kebijakan penghapusan Kode Broker untuk mengurangi kebiasaan menggiring (*herding behaviour*) pasar ke saham-saham tertentu (Bestari, 2021). Adapun tujuan Direktur BEI tersebut adalah untuk meningkatkan *market governance* dan mencegah aksi pembelian ‘saham gorengan’ oleh *herding behavior* yang berkonotasi negatif.

Adapun *herding behavior* yang berkonotasi positif ditunjukkan pada aspek keputusan manajer atau pengelola UMKM sebagai penyumbang PDB. Pada penelitian (Pradita et al., 2018) menguji *herding* pada keputusan pengajuan kredit bank di Indonesia. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat keputusan pengajuan kredit, maka semakin menambah jumlah PDB di Indonesia. Selanjutnya pada penelitian (Andhika & Damayanti, 2017) menyatakan bahwa perilaku *herding* memiliki pengaruh positif terhadap intensi pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan SAK ETAP di Kota Salatiga. Maka, konotasi positif *herding behavior* dapat mendorong intensi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK ETAP. Selain pengaruh faktor lingkungan eksternal atau kelompok, intensi

pengimplementasian SAK EMKM juga dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pemahaman akuntansi.

Pada penelitian terdahulu, pemahaman akuntansi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi implementasi standar akuntansi pada UMKM di Indonesia (Salmiah et al. 2018; Kusuma & Lutfiany 2018; Pardita et al., 2019; Pulungan & Suwita, 2020). Hal ini dikarenakan seorang manajer atau pengelola UMKM perlu memiliki *skill* pemahaman akuntansi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Salmiah et al. (2018) pemahaman akuntansi merupakan pengetahuan dan kepandaian seseorang terhadap proses dan cara perlakuan akuntansi.

Kusuma & Lutfiany (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pemahaman akuntansi menjadi faktor dominan dalam pengimplementasian SAK EMKM yaitu sebesar 57,5 %. Pulungan & Suwita (2020) menyatakan banyaknya pengusaha UKM yang kurang paham mengimplementasikan standar akuntansi, yaitu sebesar 91,1 % untuk usaha mikro dan sebesar 77,5 % untuk usaha kecil.

Salmiah et al. (2018) menyebutkan bahwa pemahaman akuntansi pada pengelola UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Pekanbaru dan UKM masih berada pada level yang cukup. Minimnya pemahaman akuntansi mengakibatkan manajer atau pengelola UMKM belum mengimplementasikan laporan keuangan sesuai standar (Saragih & Surikayanti, 2015). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa tingkat pemahaman akuntansi juga memiliki peran krusial dalam menerapkan suatu standar akuntansi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat banyak kekurangan. Adapun kekurangan-kekurangan tersebut sebagai berikut:

1. Pada penelitian terdahulu dominan meneliti intensi pengimplementasian SAK untuk UMKM dari sudut pandang atau perspektif pelaksanaan. Namun, dalam hal ini masih dinilai kurang, sehingga perlu adanya tambahan tidak hanya pada pelaksanaan tetapi pada perspektif lain terutama perspektif psikologi yang banyak mempengaruhi keputusan.
2. Penelitian ini merujuk pada penelitian (Andhika & Damayanti, 2017). Andhika & Damayanti (2017) meneliti tentang pengaruh *herding* pada intensi mereka, akan tetapi pada metode penelitian yang digunakan hanya menggunakan variabel dummy sebagai pengukuran. Penggunaan variabel dummy memiliki kelemahan pada terbatasnya opsi penggunaan alat uji statistik. Maka, pilihan menggunakan skala interval atau rasio dinilai jauh lebih baik.
3. Pada penelitian (Andhika & Damayanti, 2017) memilih variabel pengetahuan akuntansi, yang kurang menjelaskan secara mendalam terkait intensi pelaku UMKM. Adapun substitusi pengetahuan akuntansi menjadi pemahaman akuntansi lebih mencerminkan intensi manajer tersebut. Hal ini dikarenakan seorang manajer dinilai tidak hanya sekedar tahu terhadap akuntansi tetapi paham terhadap proses akuntansi dan standarnya.
4. Pada penelitian (Andhika & Damayanti, 2017) masih tertinggal pada penggunaan standar ETAP untuk UMKM. Perlu adanya *update* standar pada SAK EMKM yang lebih sederhana dan terbaru.

5. Sejauh ini, pada penelitian terdahulu belum ada yang mengaitkan variabel *collectivism* terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM pada manajer UMKM terkhusus di Kota Dumai Riau. Oleh karena itu, studi ini dapat dikatakan sebagai studi pionir, mengingat belum ada studi sebelumnya yang memberikan perhatian *collectivism* dalam konteks intensi manajer UMKM.
6. Penelitian pada disiplin ilmu ekonomi terkhusus di Indonesia, banyak mengambil variabel *herding behavior* dalam konteks keputusan investor dalam berinvestasi di pasar modal. Sejauh ini, penelitian dalam konteks *herding behavior* terhadap keputusan atau intensi manajer atau pengelola UMKM hanya ada satu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti memberi judul penelitian ini sebagai **“Pengaruh *Collectivism*, *Herding Behavior* dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Intensi Pengimplementasian SAK EMKM”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah *collectivism* berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM?
2. Apakah *herding behavior* berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM?
3. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Apakah *collectivism* berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM.
2. Apakah *herding behavior* berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM.
3. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh *collectivism*, *herding behavior* dan pemahaman akuntansi terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang akuntansi manajemen keperilakuan dalam aspek intensi penerapan SAK EMKM.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan teori terdahulu dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi UMKM dalam penerapan akuntansi untuk *going concern* UMKM.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior atau TPB merupakan teori yang dapat menjelaskan indikator-indikator yang mempengaruhi individu dalam berperilaku (Ajzen, 1991). TPB adalah perluasan dari *Theory of Reason Action* atau TRA, karena pada TRA terdapat keterbatasan model asli dalam menangani perilaku di mana orang memiliki kontrol kehendak yang tidak lengkap.

Sejauh ini, *theory of planned behavior* yang paling umum digunakan untuk mempelajari hubungan antara intensi, sikap dan perilaku. Menurut (Ajzen, 1991) alat yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki kontrol kemauan sendiri secara penuh adalah *theory of planned behavior*. *The theory of planned behavior* secara khusus cocok untuk menjelaskan intensi pengimplementasian SAK EMKM oleh manajer, karena *theory of planned behavior* mempunyai asumsi dasar yaitu banyak perilaku tidak semuanya berada di bawah *full control* dari individu sehingga perlu ditambahkan konsep *behavioural control* (kontrol perilaku) yang dipersepsi. Dalam hal ini, *behavioural control* tersebut dapat berasal dari *external control* atau luar dan *internal control* atau dalam individu (Ajzen, 1991).

Internal control merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri atau subjek. Contohnya, *skill*, *abilities* dan *information*. Adapun kontrol yang berasal dari luar subjek (*external control*) contohnya *opportunities* dan *obstacles*. Oleh karena itu, sikap dan norma subjektif tidak hanya sebagai penyebab dari dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku, namun adanya suatu persepsi dari individu terhadap kontrol yang bisa dilakukan yang berasal dari keyakinannya terhadap kontrol tersebut yang dinamakan *control beliefs* (Ajzen, 1985).

Pada *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menyatakan intensi merupakan prediktor utama untuk memprediksi perilaku. Secara konseptualnya, terdapat tiga landasan prediktor keyakinan independen yaitu:

a) Sikap Terhadap Perilaku

Sikap yaitu pandangan tentang sejauhmana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian menguntungkan atau tidak yang dapat diterima dari perilaku. Sikap merupakan prediktor yang ditentukan oleh keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku tersebut;

b) Norma Subyektif

Norma subyektif yaitu keyakinan mengenai adanya tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut yang ditentukan oleh keyakinan normatif;

c) Kontrol Perilaku yang Dirasakan (*Perceived Control Behavior*)

Kontrol perilaku yang dirasakan merupakan keyakinan persepsi orang tentang kemudahan atau kesulitan yang dirasakan. Kemudahan atau kesulitan kontrol perilaku yang dirasakan tersebut berkaitan tentang

sumber daya dan peluang yang tersedia.

2. Intensi Pengimplementasian SAK EMKM

Menurut Ajzen (1991) intensi merupakan suatu indikasi seberapa keras orang mau mencoba dan seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan perilaku. Buchan (2005) menyatakan intensi adalah anteseden langsung dari perilaku, yang diasumsikan berada di bawah kontrol kehendak.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Adapun pengimplementasian didefinisikan sebagai suatu proses pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab dalam suatu proses. SAK EMKM merupakan standar pelaporan akuntansi sederhana yang digunakan oleh UMKM (DSAK:2016: Par 1.2).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa intensi pengimplementasian SAK EMKM merupakan indikasi seberapa keras manajer UMKM mau mencoba dan seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan dalam menerapkan proses SAK EMKM. Adapun SAK EMKM tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan UMKM.

3. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang memenuhi karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berikut karakteristik UMKM yang tertuang dalam UU RI No 20 Tahun 2008 Pasal 6 :

- 1) Untuk usaha mikro memiliki kekayaan bersih dengan jumlah paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tidak termasuk aset bangunan dan tanah dari tempat usaha. Selanjutnya, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Untuk usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah paling banyak sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan jumlah paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 3) Untuk usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jumlah paling banyak sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

4. SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) merupakan standar pencatatan serta pelaporan akuntansi sederhana. Standar ini dibuat dan disahkan oleh Dewan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pada tanggal 24 Oktober 2016. Melalui *Exposure Draft* SAK EMKM. SAK EMKM berguna untuk memudahkan UMKM dalam membuat pembukuan dan laporan keuangan akuntansi (DSAK:2016:1 Par 1.1). Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) menurut (DSAK:2016: Par 1.2) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi definisi dan kriteria dari UMKM.

Adapun sejarah terbentuknya SAK EMKM berawal dari terbentuknya standar akuntansi yang berlaku umum digunakan pada perusahaan komersial dan besar. Standar tersebut dinamakan Standar Akuntansi Keuangan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Namun, dikarenakan mustahil penerapan seluruh elemen pada Standar IFRS bagi UMKM, sehingga diperlukan adanya harmonisasi akuntansi oleh faktor kelembagaan, ekonomi, budaya dan lingkungan lainnya (Baldarelli, M., et al., 2007; Baldarelli et al., 2012). Oleh sebab itu, pada tahun 2009 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan standar keuangan khusus untuk entitas tanpa pertanggungjawaban publik seperti UMKM yaitu, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI dan mulai berlaku efektif pada tahun 2011. Seharusnya hingga sekarang standar tersebut sudah banyak diimplementasikan. Namun kenyataannya,

penerapan SAK ETAP di UMKM belum memuaskan dan masih dinilai terlalu berat, kondisi tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan dan sumber daya manusia (Yanto et al., 2017).

Saragih & Surikayanti (2015); Widyastuti (2017); Warsadi et al. (2017); Hasan et al. (2019) menyatakan bahwa implementasi akuntansi sesuai SAK ETAP bagi UMKM masih belum terlaksana dengan baik dan masih sangat sederhana serta manual. Maka, pada tanggal 24 Oktober 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) membuat dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Standar ini khusus digunakan untuk UMKM melalui *Exposure Draft* (IAI, 2016). Oleh karena itu, standar ini berfungsi untuk mempermudah manajer atau pengelola UMKM dalam membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi.

Menurut (DSAK:2016:2 Par 2.1) ada beberapa tujuan laporan keuangan. Di antaranya untuk menyediakan data berupa informasi akuntansi mengenai posisi keuangan entitas dan mengetahui kinerja perusahaan. Bagi manajemen laporan keuangan juga sebagai laporan pertanggungjawaban.

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan (DSAK:2016:2 Par 2.2). Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi (DSAK:2016:2 Par 2.8).

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.1 dan 2.8 dan memenuhi kriteria sebagai berikut (DSAK:2016:2 Par 2.12):

- a) Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir kedalam atau keluar dari entitas.
- b) Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui asset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan (DSAK:2016:2 Par 2.15). Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis (DSAK:2016:2 Par 2.16).

DSAK (2016:2 Par 2.19) menyatakan bahwa entitas dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Pengakuan pada dasar akrual diakui ketika memenuhi definisi dan karakteristik pengakuan untuk pos-pos asset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Hal ini dapat digunakan oleh UMKM dalam memberi *assessment* manajemen dalam kontinuitas usaha di masa yang akan datang (DSAK:2016:2 Par 2.20). Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya (DSAK:2016:2 Par 2.21).

Adapun persyaratan entitas dalam penyajian wajar informasi laporan keuangan UMKM dalam SAK EMKM agar tercapainya tujuan sebagai berikut (DSAK:2016: 3 Par 3.3):

- a) Relevan, yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan.
- b) Representasi tepat, yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat disajikan dengan cepat dan terhindar dari bias dan kesalahan material.
- c) Keterbandingan, yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat menjadi komparatif dalam berbagai periode dan sebagai perbandingan antar entitas. Hal ini sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan entitas.
- d) Keterpahaman, yaitu informasi yang disajikan mudah dipahami oleh pengguna informasi.

Adanya pembuatan pernyataan secara *explicit* berupa CaLK (Catatan atas Laporan keuangan) jika entitas telah patuh terhadap SAK EMKM (DSAK:2016:3 Par 3.4). Sama seperti standar akuntansi lainnya penyajian secara lengkap laporan keuangan dilakukan pada akhir periode (DSAK:2016:3 Par 3.5).

Menurut (DSAK:2016:3:Par 3.9) laporan keuangan pada UMKM setidaknya terdiri atas sebagai berikut:

- a) Laporan posisi keuangan;
- b) Laporan laba rugi;
- c) Catatan atas laporan keuangan, yaitu berupa catatan tambahan atau rincian dari pos-pos tertentu.

Pada laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan (DSAK:2016:4:Par 4.1). Kemudian pada laporan laba rugi merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode, yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan beban pajak (DSAK:2016:5:Par 5.2). Pada catatan atas laporan keuangan berisi pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan (DSAK:2016:6:Par 6.2).

5. *Collectivism*

Hofstede & Hofstede (2005) menyatakan bahwa *collectivism* merupakan budaya bangsa yang berlawanan dengan *individualism*, yang berarti nilai budaya masyarakat yang cenderung terintegrasi menjadi kuat, kohesif dalam kelompok. Adapun individualisme berkaitan dengan masyarakat yang ikatan antar individu lapang, sehingga setiap orang diharapkan untuk menjaga dirinya sendiri dan keluarga dekatnya.

Hofstede (1991) menempatkan Indonesia sebagai bangsa dengan nilai budaya kolektivisme yang tinggi bila dibandingkan dengan India, Jepang, Malaysia, Philipina dan negara-negara Arab. Dalam budaya kolektif, seorang anak akan belajar untuk berpikir dalam menyebutkan “kami” daripada “saya”. Pemikiran jalan tengah dalam budaya ini mencerminkan penghargaan

terhadap pendapat bersama. Orang tidak terbiasa untuk memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat kelompok secara umum.

Menurut Septarini & Yuwono (2015) *collectivism* merupakan nilai budaya bangsa yang dikemukakan oleh Hofstede yang diinternalisasikan dalam individu, sehingga *collectivism* diadopsikan dalam kehidupan organisasi melalui budaya perusahaan. Nilai budaya yang tertanam dengan kuat dalam diri individu akan menuntun perilakunya sejalan dengan tujuan organisasi. Beberapa perusahaan di Indonesia mengidentikkan *collectivism* dengan kebersamaan yang dinyatakan dalam *corporate culture statement* mereka.

Menurut Robert & Wasti (2002) masyarakat *collectivism* adalah kelompok di mana orang-orang berada, seperti keluarga, lingkungan, atau tempat kerja, dan identitas seseorang ditentukan oleh keanggotaan dalam kelompok ini. Pada masyarakat kolektivistik, dampak keanggotaan kelompok pada definisi diri menghasilkan keinginan untuk mempertahankan harmoni dalam kelompok, dan kecenderungan untuk menundukkan preferensi dan prioritas pribadi kepada orang-orang dari kelompok.

Menurut Robert & Wasti (2002) individualisme dan kolektivisme dapat diukur dan dikonseptualisasikan sebagai perbedaan sikap individu yang masing-masing disebut sebagai sikap *idiocentrism* dan *allocentrism*. *Idiocentrism* ditandai dengan kepatuhan terhadap gagasan seperti kemandirian, keunikan, dan kemandirian; sementara *allocentrism* menunjukkan saling ketergantungan, rasa memiliki dalam kelompok, dan

tunduk pada keinginan kelompok.

Septarini & Yuwono (2015) mengiktisarkan perspektif Hofstede menjadi beberapa dimensi, sebagai berikut:

a) Hubungan antara subordinat dengan ordinat.

Dalam keluarga patriarki masyarakat kolektif, tokoh ayah sebagai kepala keluarga dianggap memiliki kekuasaan dan otoritas moral yang kuat untuk mengatur anggota keluarganya. Dalam dunia kerja, atasan menempati kedudukan ordinat dan bawahan adalah subordinatnya. Hubungan atasan dan bawahan merupakan pencerminan kehidupan keluarga, di mana hubungan moral lebih diutamakan. Atasan adalah ‘ayah’ bagi bawahannya, yang senantiasa memberikan rasa aman dan perlindungan, sedangkan bawahan harus memberikan kesetiaannya pada organisasi dan atasannya.

b) Hubungan antara individu dengan kelompok.

Dalam masyarakat kolektif, anak-anak dibesarkan di tengah keluarga besar, tidak hanya terdiri atas orang tua dan saudara sekandung. Namun, juga bersama kakek, nenek, tante, paman, sepupu dan pembantu. Dalam perkembangannya anak mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok, sebagai bagian dari ‘kami’ yang memiliki perbedaan dengan ‘mereka’ dari kelompok lain. Kesetiaan individu terhadap kelompok merupakan hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini dapat berarti sebagai pemerataan kesejahteraan, di mana individu dengan pendapatan lebih wajib membantu keluarganya yang kekurangan. Budaya malu

dikembangkan bila individu melakukan kesalahan. Individu cenderung merasa malu terhadap kelompoknya bila ia melakukan penyimpangan, bukan merasa bersalah yang lebih mengarah pada introspeksi pribadi. Hal ini berkaitan dengan kuatnya ikatan kelompok, sehingga kesalahan individu seringkali disamakan dengan kesalahan kelompok yang harus ditanggung bersama.

c) Pengambilan keputusan.

Keputusan merupakan hasil konsensus yang mengutamakan kepentingan bersama. Pendapat pribadi ditentukan oleh kelompok, bila perlu diadakan pertemuan keluarga besar untuk membahas persoalan anggota kelompok. Individu yang mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat kelompok dianggap memiliki karakter yang tidak baik.

d) Harmonisasi merupakan kunci ketahanan kelompok.

Konfrontasi langsung sedapat mungkin harus dihindari karena dianggap sebagai kekasaran dan tidak diharapkan. Kata ‘tidak’ jarang digunakan sebab diasosiasikan dengan penolakan yang mengarah pada konfrontasi dan memicu konflik.

e) Komunikasi.

Pada masyarakat kolektif, tingkat komunikasi merupakan *high context communication*. Menurut Edward T. Hall (dalam Hofstede, 1991) informasi tidak perlu dikatakan atau disampaikan secara verbal seluruhnya, melainkan secara eksplisit melalui pertanda dan bahasa tubuh tertentu. Kata ‘ya’ bukan berarti persetujuan, namun lebih diartikan

sebagai penghargaan atas pendapat seseorang, karena kata ‘tidak’ senantiasa dihindari dalam masyarakat kolektif agar tidak mengecewakan orang lain. Komunikasi dilakukan secara tidak langsung. Evaluasi dan teguran terhadap kinerja seseorang tidak disampaikan secara langsung terhadap yang bersangkutan, karena dianggap menyinggung dan mempermalukan perasaan seseorang, sehingga disampaikan melalui arbitrator yang dapat dipercaya oleh kedua pihak atau melalui cara non verbal.

f) Sistem manajemen.

Pada masyarakat kolektif, sistem manajemen dominan oleh kelompok. Secara tidak langsung anggota akan menggabungkan dirinya pada suatu kelompok kerja tertentu berdasarkan kesamaan latar belakang. Etnis dan perbedaan antar kelompok merupakan pertimbangan dalam penempatan kerja. Bonus dan penghargaan diberikan pada kelompok, bukan terhadap individu, karena keberhasilan kerja dihasilkan oleh kerja kelompok, bukan kinerja pribadi.

6. *Herding Behavior*

Raafat et al. (2009) menyatakan bahwa frasa *herding behavior* pertama kali diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh petugas medis Trotter pada tahun 1908. Trotter (1908) menyatakan bahwa teori *herding behavior* merupakan naluri yang berasal dari psikologis bawaan manusia untuk mengikuti kelompok sosial mereka.

Sejarah perjalanan riset tentang *herding behavior* telah banyak menarik peneliti sejak tahun 1759 hingga saat ini, dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Raafat et al. (2009) menyatakan riset-riset berkaitan dengan *herding* banyak ditekankan oleh disiplin ilmu psikologi (Veblen, 1899); ekonomi (Keynes, 1936), (Smith, 1759), (Devenow & Welch, 1996); sosiologi (Simmel, 1910); Psikiatri/ Obat-obatan (Freud, 1922) dan lain-lain.

Riset *herding behavior* pada disiplin ilmu ekonomi, banyak ditemukan pada keputusan investasi. Pada keputusan *Herding* terjadi, ketika investor mengabaikan keyakinan pribadinya dan lebih memilih mengikuti keyakinan investor lain tanpa berfikir lebih matang yang ditinjau dari sisi psikologis (Devenow & Welch, 1996; Hatice Doğukanlı, 2011).

Herding behavior atau perilaku kawanan merupakan perilaku yang mencoba menjelaskan aspek non-rasional dalam perspektif perilaku (Başarir & Yilmaz, 2019). Sejumlah motif intrinsik, seperti *mood* (emosi), dan kecenderungan psikologis (perspektif) pengambil keputusan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di pasar modal (Hatice Doğukanlı, 2011). Dengan kata lain pada titik inilah muncul perilaku kawanan (*herding behavior*) yang merupakan salah satu perilaku yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan bagi para pengambil keputusan.

Setiyono et al. (2013) menyatakan *herding behavior* sebagai perilaku pengembalaan yang dapat dijelaskan melalui satu atau lebih dari tiga model rasional *herding*: (i) *herding* berbasis informasi, (ii) *herding* akuisisi informasi dan (iii) *herding* berbasis reputasi dan kompensasi.

1) *Herding Berbasis Informasi / Information Cascades*

Pengembalaan berbasis informasi terjadi saat kondisi yang tidak pasti dan informasi yang sepenuhnya sempurna, pertukaran informasi antar individu akan meningkatkan pengetahuan pada kondisi tertentu yang berdampak pada pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan individu cenderung mengamati dan mempelajari perilaku individu lainnya. Pengembalaan berbasis informasi ini juga dikenal sebagai *information cascades* (Bikhchandani et al., 1992; Raafat et al., 2009).

Menurut Raafat et al. (2009) *information cascades* diasumsikan sebagai informasi yang terjadi pada suatu kondisi agen atau individu yang memilih keputusan secara berurutan sama. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan rasional dari pilihan yang diamati dari agen-agen sebelumnya. Pada kondisi ini telah terjadi *mentalitas process*, yaitu agen kedua mengamati pilihan atau keputusan agen pertama dan menyimpulkan 'sinyal' atau pendapat informasi pribadi mereka, sehingga secara rasional menggabungkan ini dengan pendapat mereka sendiri (dengan cara bayesian).

Suatu *information cascades* dapat dikatakan baik jika keputusan yang dibuat oleh agen pertama atau pendahulu, sesuai dengan keadaan dunia yang sebenarnya. *Information cascades* dapat dikatakan buruk jika sebaliknya. Maka, kaskade dengan cepat mencapai 'titik kritis' jika mereka secara rasional mengabaikan informasi pribadi mereka.

2) *Herding Akuisisi Informasi (Informational Acquisition Herding)*

Herding akuisisi informasi merupakan model yang menekankan *externalitas effect* (informasi dari dampak keuntungan/kerugian) hasil diusulkan oleh Froot et al. (1992) dan Hirshleifer et al. (1994) dalam Setiyono et al. (2013). Model ini menghitung perbedaan ketika informasi diperoleh oleh investor atau individu yang terinformasi. Pasar yang investornya menerima informasi pada waktu yang berbeda memiliki keseimbangan yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan pasar yang investornya menerima informasi secara bersamaan. Pada pasar seperti itu, investor yang terinformasi lebih agresif akan menikmati keuntungan yang lebih besar daripada investor yang terlambat mendapat informasi. Untuk mendapatkan keuntungan juga, maka investor yang diinformasikan terlambat akan menerapkan strategi mengikuti perilaku investor yang diinformasikan sebelumnya.

Pada penelitian ini, peneliti mereplikasi aspek investor menjadi pengelola atau manajer UMKM. Maka, *informational acquisition herding* terjadi ketika pengelola UMKM mengakuisisi informasi yang diperoleh oleh manajer atau pengelola UMKM dari kelompok lain tentang *externalitas effect* (informasi dampak keuntungan) dari penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Kemudian mereka mengikuti perilaku dari pengelola UMKM yang telah dapat informasi sebelumnya tersebut.

3) *Herding* Berbasis Reputasi dan Kompensasi (*Reputation and Compensation Herding*)

Herding berbasis reputasi dan kompensasi merupakan model yang didasarkan pada anggapan bahwa dalam situasi tertentu seorang manajer akan mengikuti keputusan manajer lain dengan mengabaikan informasi pribadinya ketika mempertaruhkan reputasi atau kariernya (Setiyono et al., 2013). Model ini ditandai ketika tidak ada informasi yang sempurna di pasar, maka kepentingan pribadi muncul. Pada kondisi demikian, seorang investor dapat mengikuti atau tidak mengikuti tindakan investor atau manajer lain demi mempertaruhkan reputasi, karier, atau kompensasi tertentu.

7. Pemahaman Akuntansi

Dalam KBBI paham berarti memiliki pengertian sebagai tahu dan mengerti benar dengan sesuatu. Adapun pemahaman berarti cara, proses mengenai sesuatu. Menurut Suwardjono (1991) menyatakan akuntansi sebagai sebuah seperangkat pengetahuan yang lebar dan kompleks. Pemahaman akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kecakapan seseorang dalam mengenal dan mengerti tentang akuntansi serta prosesnya. Jadi, individu yang mempunyai pemahaman akuntansi adalah individu yang pandai dan mengerti baik proses akuntansi.

Menurut (Salmiah et al., 2018) pemahaman akuntansi SAK EMKM merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi (membedakan) dan mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAK EMKM. Pengukuran dari tingkat pemahaman akuntansi dapat diukur dari konsep individu terhadap proses akuntansi.

Salmiah et al. (2018) menyebutkan beberapa indikator dari pemahaman akuntansi berdasarkan konsep SAK EMKM sebagai berikut :

a) Pengukuran.

- 1) Menurut SAK EMKM, dasar pengukuran unsur laporan keuangan adalah biaya historis (DSAK:2016:2 Par 2.16).

b) Asumsi Dasar

- 1) Menurut SAK EMKM, entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi akrual basis DSAK (2016:2 Par 2.19).
- 2) Menurut SAK EMKM, entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya (DSAK:2016:2 Par 2.21).
- 3) Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen (pelaku UMKM) menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya atau kelangsungan usaha (DSAK:2016:2 Par 2.20).

c) Penyajian Laporan Keuangan

- 1) Menurut SAK EMKM, laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (DSAK:2016:3:Par 3.9).
- 2) Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode (DSAK:2016:4:Par 4.1).
- 3) Laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, dan pajak penghasilan (DSAK:2016:5:Par 5.2).
- 4) Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan (DSAK:2016:6:Par 6.2).

B. Penelitian Terdahulu

Dalam literatur akuntansi, penelitian terkait implementasi standar akuntansi pada UMKM telah dilakukan di beberapa negara dengan menguji berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi standar akuntansi pada UMKM. Pada penelitian implementasi standar akuntansi di Indonesia sebagian besar dominan pada faktor: pemahaman akuntansi (Salmiah et al. 2018; Kusuma & Lutfiany 2018; Pardita et al., 2019; Pulungan & Suwita, 2020). Faktor tingkat pendidikan (Yanto et al. 2017; Febriyanti & Wardhani, 2018; Kusuma & Lutfiany, 2018; Hasan et al., 2019). Faktor persepsi (Kusuma & Lutfiany, 2018 & Febriyanti & Wardhani, 2018).

Pada penelitian Kusuma & Lutfiany (2018) tentang pengaruh sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Bogor menggunakan metode survei. Sampel pada penelitian ini adalah 96 pemilik UMKM di Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM dan pemahaman akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Secara parsial menunjukkan bahwa semua indikator berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Bogor. Besarnya kontribusi pengaruh sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM yaitu sebesar 57,5% dan faktor pemahaman akuntansi merupakan variabel yang paling dominan terhadap implementasi SAK EMKM. Uji statistik yang digunakan adalah analisis linier berganda.

Pada penelitian Salmiah et al. (2018) tentang pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM : *survey* pada UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, menggunakan metode survei. Sampel dalam penelitian ini adalah 92 Pelaku UMKM yang memiliki IUMK di Koperasi Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa pemahaman tentang Pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru masih dalam taraf yang cukup. Uji statistik yang digunakan uji statistik deskriptif yang mencakup nilai rata-rata yang diperoleh

dari skor jawaban responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan membuat rentang skor.

Pada penelitian Widyastuti (2017) tentang pencatatan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang jasa menggunakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dengan informan. Sampel dalam penelitian ini adalah usaha jasa Sanggar Belajar *Disciple Course* (Dis-Co) yang berlokasi di Jl. Tosaren II No. 12 Kediri, Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana yang disebabkan kurangnya pengetahuan pengusaha terhadap tujuan, manfaat dan tahapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Penelitian ini menggunakan tahap analisis kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Pada penelitian Pardita et al. (2019) tentang pengaruh tingkat penerapan sistem pencatatan akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi dan tingkat kesiapan Pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Gianyar menggunakan metode survei. Sampel pada penelitian ini adalah 100 Pelaku UMKM yang terletak di Kabupaten Gianyar yang tercatat di Dinas Koprasi dan UMKM. Hasil penelitian menunjukan bukti empiris bahwa tingkat penerapan sistem pencatatan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM, variabel tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penerapan SAK EMKM, variabel tingkat kesiapan pelaku UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM dan variabel tingkat penerapan akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi dan kesiapan pelaku UMKM secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. Uji statistik yang digunakan uji kualitas data, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji analisis linear berganda.

Pada penelitian Pulungan & Suwita (2020) tentang analisis pemahaman dan kesiapan Pengelola UMKM dalam implementasi laporan keuangan berbasis SAK EMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kota Medan) menggunakan metode survei. Sampel pada penelitian ini adalah 22 pengelola UMKM di Kecamatan Medan Denai. Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa Pengelola UMKM tidak paham mengenai SAK EMKM sebesar 91.2% usaha mikro dan sebesar 77.5% untuk usaha kecil. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif.

Pada penelitian Warsadi et al. (2017) tentang penerapan penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil menengah berbasis standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah pada PT. Mama Jaya menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM menyusun laporan keuangan masih sangat sederhana dan manual dikarenakan UKM hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran guna

mendapatkan informasi laba saja. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian Febriyanti & Wardhani (2018) tentang pengaruh persepsi, tingkat pendidikan, dan sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM wilayah Kota Surabaya menggunakan metode *convenience sampling* pada pengusaha UMKM di Kota Surabaya. Sampel pada penelitian ini adalah 50 UMKM di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa secara parsial persepsi pengusaha UMKM berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM. Kemudian pada tingkat pendidikan dan sosialisasi berpengaruh negatif. Uji statistik menggunakan analisis linier berganda. Metode analisis data yang digunakan, yaitu uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Pada penelitian Hasan et al. (2019) tentang prospek standar akuntansi implementasi: entitas mikro, kecil dan menengah berdasarkan kualitas laporan keuangan yang berlaku efektif pada 01 januari 2018 (*study on small usaha menengah di Kabupaten Rokan Hulu*) menggunakan metode survei. Sampel pada penelitian ini adalah 815 UMKM yang terdiri dari 5 (lima) klasifikasi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa 1) tingkat pendidikan pemilik tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada UKM di Kabupaten Rokan Hulu, 2) latar belakang pendidikan pemilik tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada UKM di Kabupaten Rokan Hulu, 3) ukuran bisnis berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Rokan Hulu. ukuran usaha besar cenderung mencatat

laporan keuangan, 4) durasi usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada UKM di Kabupaten Rokan Hulu, dan 5) prospek penerapan IFRS UMKM masih rendah. Uji statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

Pada penelitian Maes et al. (2014) tentang perbedaan gender dalam niat berwirausaha: analisis multi-kelompok TPB pada tingkat faktor dan indikator, menggunakan metode *survey*. Sampel pada penelitian ini 437 mahasiswa pascasarjana di Flanders, Belgia. Uji statistik yang digunakan adalah uji hipotesis menggunakan SEM PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pengaruh gender pada niat kewirausahaan dimediasi melalui sikap pribadi dan kontrol perilaku yang dirasakan tetapi bukan norma sosial.

Pada penelitian Baldarelli et al. (2012) tentang harmonisasi akuntansi untuk UMKM di Eropa : beberapa komentar tentang IFRS untuk UMKM dan bukti empiris, menggunakan metode survei. Sampel pada penelitian ini 20 akuntan UKM Kroasia (beroperasi di berbagai industri: industri furnitur, perdagangan, sambungan kayu, industri pers, tekstil, industri logam, layanan akuntansi dan audit, industri konstruksi, layanan teknis, industri grafis, konsultasi, perawatan kesehatan). Uji statistik yang digunakan adalah uji *fishers's exact test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi gelar dan sertifikat kompetensi yang dimiliki maka mereka semakin paham standar akuntansi, ukuran perusahaan, jumlah karyawan, tingkat pendidikan peserta

ujian tidak berpengaruh secara signifikan dan pentingnya faktor lain mendukung harmonisasi standar akuntansi bagi UMKM seperti faktor antropologis, sikap UKM, dan budaya. Di mana budaya bangsa dapat mengatasi masalah tersebut khususnya bagi UMKM.

Pada penelitian Septarini & Yuwono (2015) tentang pengaruh budaya kolektivisme terhadap kompetensi inti pada kelompok lini manajerial PT Semen Gresik (Persero) Tbk menggunakan metode survei. Sampel penelitian ini adalah 78 jajaran lini manajerial setingkat kepala seksi di PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya kolektivisme terhadap kompetensi inti pada kelompok lini manajerial PT Semen Gresik (Persero) Tbk. koefisien determinasi sebesar 16,9%, dapat dikatakan bahwa faktor budaya kolektivisme berpengaruh 16,9%. Uji statistik yang digunakan adalah uji analisis regresi dengan satu prediktor.

Pada penelitian Yulanda (2015) tentang pengaruh nilai budaya bisnis pada masyarakat Minangkabau terhadap perilaku kewirausahaan pedagang perantau di Tanah Abang menggunakan metode *survey explanatory*. Sampel pada penelitian ini adalah 400 pedagang perantau bersuku Minangkabau di Pasar Tanah Abang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku budaya *Uncertainty Avoidance*, *Masculinity-Femininity* dan *Long And Short Time Orientation* berpengaruh signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. Adapun *power distance* berpengaruh berlawanan terhadap minat berwirausaha dan *individualism-collectivism* tidak mempunyai pengaruh terhadap perilaku

kewirausahaan. Uji statistik yang digunakan adalah analisis regresi dan korelasi, uji f dan uji t.

Pada penelitian Widodo & Qurniawati (2015) tentang pengaruh kolektivisme, *perceived consumer effectiveness*, dan kepedulian lingkungan terhadap perilaku pembelian ramah lingkungan menggunakan metode survei. Sampel pada penelitian ini adalah 40 masyarakat di Salatiga dengan minimal pendidikan SMA. Hasilnya menunjukkan bahwa kolektivisme berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian lingkungan ramah; *Perceived Consumer Effectiveness* (PCE) berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian yang ramah lingkungan; kesadaran lingkungan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian ramah lingkungan. Uji statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji F.

Pada penelitian Puspitasari & Mas'ud (2018) tentang pengaruh nilai budaya nasional indonesia terhadap preferensi gaya manajemen konflik (studi pada karyawan tendik FISIP UNDIP) menggunakan metode survei. Sampel pada penelitian ini adalah 80 karyawan tendik FISIP UNDIP. Hasil penelitian menunjukan bahwa karyawan tendik FISIP UNDIP menerapkan budaya kolektivisme. Uji statistik yang digunakan adalah regresi sederhana dan linier berganda.

Pada penelitian Prince & Kabst (2019) tentang dampak budaya nasional pada organisasi penggunaan praktik seleksi menggunakan metode survei panel. Sampel pada penelitian ini adalah 2.604 organisasi swasta. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa *collectivism* dalam kelompok meningkatkan penggunaan wawancara panel dan tes teknis, dan mengurangi penggunaan wawancara satu lawan satu dan formulir aplikasi. *Uncertainty avoidance* meningkatkan penggunaan wawancara panel dan tes teknis, dan penurunan wawancara satu lawan satu, kemampuan aplikasi, dan tes psikometri. *Power distance* menyebabkan peningkatan wawancara satu lawan satu, aplikasi dan tes kemampuan, dan penurunan wawancara panel, tes psikometri, dan referensi. Uji statistik yang digunakan adalah OLS *regression analysis*, uji reliabilitas.

Pada penelitian Setiyono et al. (2013) tentang mendeteksi keberadaan *herding behavior* dalam *intraday date*: bukti dari Bursa Efek Indonesia menggunakan metode data sekunder. Sampel pada penelitian ini adalah 1512 data transaksi saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2003-2005. Hasil penelitian menunjukkan intensitas *herding behavior* institusional di BEI rata-rata 8,4 %. Uji statistik yang digunakan adalah uji beda rata-rata, uji T, uji F dan uji ANOVA.

Pada penelitian Pradita et al. (2018) tentang keputusan pengajuan kredit bank: pemeriksaan awal perilaku UMKM *herding* di Indonesia menggunakan metode survei. Sampel yang digunakan adalah 150 pemilik UMKM di Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan *herding* secara tidak langsung mempengaruhi keputusan untuk mengajukan kredit melalui maksud untuk mengajukan kredit. Uji statistik yang digunakan adalah uji *Goodness of Fit*, *partial least square* (SEM-PLS), *Average Path Coefficient* (APC) dan

Average R-squared (ARS).

Pada penelitian Andhika & Damayanti (2017) tentang niat melakukan pencatatan akuntansi pada usaha kecil menengah: pengetahuan akuntansi ataukah *herding* menggunakan metode survei. Sampel pada penelitian ini adalah 91 pengusaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku *herding* dan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap kemauan dalam membuat pencatatan keuangan. Uji statistik yang digunakan adalah uji hipotesis, uji t, uji beda koefisien, analisis regresi berganda.

Pada penelitian Fransiska et al. (2018) tentang *herding behavior in indonesian investors* menggunakan metode *Vektor Auto Regression (VAR)*. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat pada indeks saham LQ 45 periode 2014 – 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis VAR yaitu uji kausalitas Granger, menunjukkan adanya interaksi dinamis antara ukuran dan perilaku *herding* dan juga antara kembali pasar dan perilaku *herding*. Uji statistik yang digunakan adalah uji *stationarity*, *lag order determination*, uji *cointegration*, uji *model stability*, uji *Granger causality*, *variance decomposition*, and *impulse response function*.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan *Collectivism* dengan Intensi Pengimplementasian SAK EMKM

Pada *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menyatakan intensi merupakan faktor utama untuk memprediksi perilaku. Secara konseptualnya, terdapat tiga landasan prediktor keyakinan independen yaitu: (1) sikap

terhadap perilaku, (2) norma subyektif, (3) kontrol perilaku yang dirasakan.

Wishnuwardhani & Mangundjaya (2008) dalam Andhika & Damayanti (2017) menyatakan bahwa terkait norma subyektif tersebut akan menyeret individu untuk berperilaku yang ditentukan oleh budaya nasional dalam kelompok. Berdasarkan model (Hofstede Insight, 2021) budaya nasional dibagi menjadi enam dimensi yaitu: *power distance*, *collectivism-individualism*, *masculinity*, *uncertainty avoidance*, *long term orientatiton*, dan *indulgence*.

Collectivism diduga menjadi faktor penting yang mempengaruhi intensi dalam penelitian ini, karena tingkat *individualism* di Indonesia dikatakan rendah dengan skor 14 (Hofstede Insight, 2021). *Collectivism* atau kolektivisme merupakan kebalikan dari *individualism*. *Collectivism* didefinisikan sebagai sejauh mana orang-orang dalam masyarakat diintegrasikan ke dalam kelompok yang kuat dan kohesif. Seringkali keluarga besar yang terus melindungi mereka dengan imbalan kesetiaan yang tidak perlu dipertanyakan dan menentang yang lain dalam kelompok (Hofstede, 2005). Menurut Septarini & Yuwono (2015) *collectivism* merupakan nilai budaya bangsa yang dikemukakan oleh Hofstede yang diinternalisasikan dalam individu, sehingga *collectivism* diadopsikan dalam kehidupan organisasi melalui budaya perusahaan.

Selama ini pada penelitian terdahulu membahas *collectivism* pada lintas budaya. Pada penelitian (Prince & Kabst, 2019) membahas *collectivism* dengan kaitan praktik seleksi pegawai pada 18 perusahaan di negara berbeda.

Kemudian penelitian selanjutnya budaya hofstede pada organisasi atau perusahaan. Pada penelitian (Pratiwi & Dwita, 2020) mengungkapkan adanya pengaruh positif budaya *power distance* terhadap keputusan *whistleblowing* pada auditor. Kemudian pada penelitian (Septarini & Yuwono, 2015) melihat pengaruh *collectivism* terhadap kompetensi inti pada kelompok lini manajerial PT. Semen Gresik.

Pada tahun 2015 (Widodo & Qurniawati, 2015) melihat *collectivism* pada keputusan perilaku pembelian ramah lingkungan di Salatiga. Pada 2017 (Nurlaeli, 2017) menguji pengaruh *collectivism* terhadap keputusan nasabah memilih Bank di Banyumas. Pada penelitian selanjutnya (Puspitasari & Mas'ud, 2018) menunjukkan adanya pengaruh *collectivism* pada gaya manajemen konflik. Pengujian penelitian *collectivism* pada etnis Jawa dilakukan oleh (Wishnuwardhani & Mangundjaya, 2008). Kemudian pada etnis Minangkabau (Yulanda, 2015). Namun, kurang membahas tentang tingkat *collectivism* pada masyarakat etnis Melayu dalam pengambilan keputusan.

Terkhusus masyarakat Kota Dumai merupakan masyarakat kolektif yang didominasi oleh suku melayu (sddkd.riau.go.id). Dalam literatur belum ditemukan penelitian terkait *collectivism* pada budaya melayu. Oleh karena itu, penelitian terkait *collectivism* masyarakat melayu dalam pengambilan keputusan dapat menjadi hal kebaruan. Adapun sampel manajer atau pengelola UMKM di Kota Dumai diharapkan dapat mencerminkan budaya melayu yang *collectivism*. Berdasarkan teori Hofstede tersebut, dapat

diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat *collectivism* pada manajer atau pengelola UMKM, maka semakin tinggi keputusan mereka untuk mengikuti kelompok dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti menarik hipotesis yaitu:

H₁: *Collectivism* berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM.

2. Hubungan *Herding Behavior* dengan Intensi Pengimplementasian SAK EMKM

Herding Behavior merupakan perilaku ikut-ikutan yang berasal dari faktor luar seperti lingkungan, teman, keluarga dan sebagainya. Menurut (Trotter, 1908) teori *herding behavior* merupakan naluri yang berasal dari psikologis bawaan manusia untuk mengikuti kelompok sosial mereka. Pada pengelola UMKM yang terindikasi *herding behavior*, mereka akan cenderung untuk meniru kebiasaan atau perilaku manajer atau pengelola UMKM lain.

Prevalensi *herding* pada disiplin ilmu ekonomi di Indonesia telah menarik perhatian. Sejauh ini, penelitian *herding behavior* pada disiplin Ilmu Ekonomi di Indonesia didominasi oleh keputusan investor dalam berinvestasi, (Setiyono et al., 2013; Fransiska et al., 2018). Fenomena *herding* di Indonesia baru-baru ini terkait perencanaan Direktur BEI Laksono Widodo. Laksono Widodo membuat perencanaan kebijakan penghapusan Kode Broker untuk mengurangi kebiasaan menggiring (*herding behaviour*) pasar ke saham-saham tertentu (Bestari, 2021). Adapun tujuan Direktur BEI tersebut adalah untuk meningkatkan *market governance* dan mencegah aksi pembelian ‘saham

gorengan' oleh *herding behavior* yang berkonotasi negatif.

Adapun *herding behavior* yang berkonotasi positif ditunjukkan pada aspek keputusan manajer atau pengelola UMKM sebagai penyumbang PDB. PDB merupakan suatu nilai atas jasa dan barang yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2013:34). PDB dapat dilihat dari kinerja UMKM. Menurut Yanto et al. (2020) kinerja UMKM secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan informasi akuntansi oleh manajer atau pemilik usaha. Menurut Andhika & Damayanti (2017) manajer atau pengelola usaha yang termotivasi dalam perilaku *herding* akan cenderung mengikuti kelompoknya termasuk pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa semakin besar *herding behavior* pada manajer atau pengelola, maka semakin besar kemungkinan mereka mengikuti manajer atau pengelola UMKM lain dalam mengimplementasikan SAK EMKM.

Dengan demikian, peneliti menduga bahwa:

H2 : *Herding behavior* berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM

3. Hubungan Pemahaman Akuntansi dengan Intensi Pengimplementasian SAK EMKM

Pemahaman akuntansi diperlukan bagi manajer atau pengelola UMKM dalam mengimplementasikan suatu standar akuntansi. Hal ini dikarenakan seorang manajer tidak akan mungkin mampu menerapkan standar jika tidak paham proses akuntansi. Oleh karena itu, Pemahaman akuntansi diduga kuat mempengaruhi pertimbangan manajer atau pengelola untuk melakukan

pengimplementasian SAK EMKM. Menurut (Salmiah et al., 2018) pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAK EMKM.

Berdasarkan bukti empiris pemahaman akuntansi merupakan faktor dominan dan krusial dalam intensi pengimplementasian SAK EMKM (Salmiah et al. 2018; Kusuma & Lutfiany 2018; Pardita et al., 2019; Pulungan & Suwita, 2020). Oleh karena itu, besar kemungkinan bahwa semakin paham manajer atau pengelola UMKM pada proses akuntansi maka mereka cenderung memiliki intensi pengimplementasian SAK EMKM. Dengan demikian, peneliti menduga bahwa:

H3 : Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM

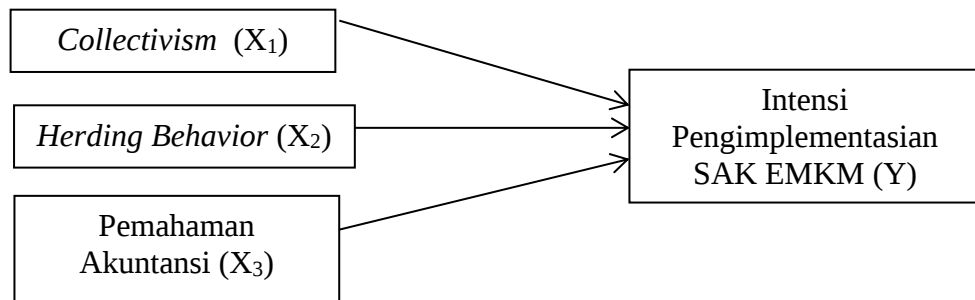
Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirangkum sebagai berikut:

H₁ *Collectivism* berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM.

H₂ *Herding behavior* berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM.

H₃ Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM.

D. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Collectivism* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM.
2. *Herding behavior* berpengaruh signifikan positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM.
3. Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini hanya menggunakan ED SAK EMKM sebagai acuan, sebaiknya merujuk pada SAK EMKM secara langsung. Oleh karena itu, masih ada beberapa hal yang belum terpaparkan terkait SAK EMKM. Seperti, tidak adanya laporan pembandingan pada ED.
2. Pada item-item indikator pemahaman akuntansi kurang mencerminkan pemahaman akuntansi. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat diperdalam terkait item pertanyaan tersebut.

C. Implikasi Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Collectivism* tidak berpengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM. Oleh karena itu, hal ini belum bisa membuktikan teori *collectivism* oleh Hofstede sebagai sebagai unsur kebaruan yang berpengaruh dari riset ini. Oleh karena itu, tinggi atau rendahnya *collectivism* tidak akan berpengaruh terhadap tingkat intensi mereka untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Kemudian pada *herding behavior* menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM. Hal ini mengimplikasikan bahwa perilaku *herding* yang tinggi akan meningkatkan intensi manajer dalam penerapan akuntansi sesuai SAK EMKM. Selanjutnya pada pemahaman akuntansi menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap intensi pengimplementasian SAK EMKM. Hal ini mengimplikasikan bahwa jika pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif maka bisa meningkatkan intensi manajer UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang harus dilakukan lebih lanjut diantaranya:

- a. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian yang tidak hanya pada tingkat Kab./Kota, namun dengan mengkaji secara nasional.

- b. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan riset intensi implementasi standar UMKM dengan menambahkan tingkat *compliance* atau perilaku psikologi lainnya seperti *hustle culture* dan lain-lain.
- c. Pada penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif agar dapat mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan intensi pengimplementasian SAK EMKM. Misalnya, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan sebagainya.